

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum kepala daerah, juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah momentum penting dalam demokrasi yang memungkinkan orang untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Iklan politik menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh kandidat selama Pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat umum. Namun, iklan politik juga dapat menyebabkan kontroversi seperti pelanggaran undang-undang penyiaran, manipulasi data, dan kampanye hitam. Dalam keadaan seperti ini, fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklan politik yang disiarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya berbagai platform media, termasuk media sosial, membuat pengawasan iklan politik semakin sulit. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menangani masalah ini dan metode apa yang digunakan untuk memastikan iklan politik disiarkan sesuai dengan peraturan. Iklan politik sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Peneliti ingin memeriksa berbagai jenis iklan politik yang disiarkan yaitu iklan televisi dan iklan radio, serta bagaimana pengawasan KPID dapat mempengaruhi jenis informasi yang diterima pemilih. Mendapatkan informasi yang akurat dan tidak berkeliaran adalah penting dalam demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KPID Sumbar berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada pemilih.

Penelitian ini berfokus pada strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat mengawasi iklan politik selama Pemilu 2024. Iklan yang ditayangkan di radio dan televisi lokal, yang sering menjadi platform utama di wilayah Sumbar, akan menjadi bagian dari iklan politik yang akan dianalisis. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan salah satu staf KPID Sumbar, Iklan yang mengandung elemen berikut menarik perhatian penelitian ini: (1) cerita yang provokatif, (2) kemungkinan penyebaran hoaks, (3) durasi dan waktu penyiaran yang melanggar aturan, dan (4) penggunaan fasilitas publik untuk promosi politik.

Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari beberapa masalah utama, di antaranya:

1. Rendahnya Kepatuhan Terhadap Regulasi: Meskipun Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPID menetapkan peraturan untuk penyiaran iklan politik, banyak pelanggaran tetap terjadi, seperti menyiarkan di luar jadwal kampanye yang ditentukan.
2. Kurangnya Pengetahuan Publik tentang Iklan Politik: Banyak orang tidak tahu tentang batas-batas iklan politik, sehingga mereka sering terpapar informasi yang bias atau manipulatif.
3. Kendala KPID dalam Pengawasan: Sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas sering menjadi hambatan bagi KPID untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik.

Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami bahwa KPID melakukan pengawasan proaktif dan reaktif. KPID harus membuat strategi pengawasan iklan

politik yang lebih efisien yang mencakup penggunaan teknologi untuk memantau konten yang disiarkan. Dengan cara ini, KPID dapat lebih cepat menemukan pelanggaran dan mengambil tindakan untuk menjaga integritas penyiaran..

Terdapat gap penelitian yang perlu dipenuhi dari sisi penelitian, Sebagian besar penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada pengaruh iklan politik terhadap perilaku pemilih atau analisis konten iklan, tetapi sedikit yang mempelajari peran pengawasan KPID. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan baru tentang peran pengawasan KPID, khususnya dalam konteks Pemilukada Sumatera Barat.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang strategi KPID Sumbar dalam mengawasi penyiaran iklan politik dan menawarkan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan memahami peran dan kesulitan KPID, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga bermanfaat untuk perubahan kebijakan penyiaran di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi KPID Sumatera Barat dalam mengawasi penyiaran iklan politik pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2024. Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena peran KPID sebagai regulator sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam penelitian ini, penulis akan melihat berbagai aspek pengawasan KPID, seperti cara-cara yang digunakan untuk mengawasi iklan

politik, masalah yang dihadapi di era digital, dan bagaimana pengawasan tersebut berdampak pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. Penelitian ini, dengan mempertimbangkan Strategi KPID dalam konteks ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang seberapa efektif pengawasan iklan politik dan Strategi KPID dalam menjaga integritas Pemilu pada 2024.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi KPID Sumatera Barat dalam mengawasi iklan politik selama Pemilu pada 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengevaluasi metode yang digunakan oleh KPID untuk melaksanakan tugas pengawasannya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi dalam lingkungan penyiaran yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pengawasan KPID terhadap kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat serta bagaimana pengawasan ini membantu menciptakan keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu KPID dan pemangku kepentingan lainnya di masa depan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan iklan politik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa itu akan membantu berkembangnya bidang ilmu komunikasi, khususnya bidang studi komunikasi politik dan regulasi media. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang ada mengenai hubungan antara media, undang-undang, dan praktik komunikasi politik dengan melihat bagaimana KPID Sumatera Barat mengawasi iklan politik selama Pemilukada 2024. Penelitian ini akan memberi peneliti pemahaman baru tentang bagaimana lembaga pengawas beroperasi dalam konteks pemilihan umum dan bagaimana hal itu berdampak pada dinamika komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu akademisi dan praktisi memahami masalah dan pendekatan yang dihadapi dalam pengawasan media. Ini akan mendorong pembentukan teori baru tentang komunikasi politik dan regulasi media.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini akan membantu KPID Sumatera Barat meningkatkan pengawasan penyiaran, khususnya iklan politik selama Pemilukada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagian proses pengawasan yang perlu diperbaiki dengan menganalisis fungsi dan pendekatan yang digunakan oleh KPID. Hasilnya diharapkan dapat membantu KPID membuat kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan bahwa iklan politik disiarkan secara adil dan transparan. Selain itu, input seperti ini dapat membantu KPID berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan partai

politik, untuk menciptakan lingkungan media yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan meningkatkan literatur ilmu komunikasi, terutama tentang pengawasan media dan komunikasi politik. Penelitian dengan judul "Strategi KPID Sumbar dalam Mengawasi Penyiaran Iklan Politik pada Masa Pemilu 2024," diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang fungsi dan masalah yang dihadapi lembaga pengawas dalam konteks pemilihan umum. Penelitian ini akan meningkatkan diskusi akademik tentang peraturan media dan praktik komunikasi politik di Indonesia. Selain itu, akan memberikan referensi yang bermanfaat bagi Mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk pengembangan kursus ilmu komunikasi karena menekankan betapa pentingnya pengawasan media untuk menjaga proses demokrasi berjalan lancar.